



PISAgroNEWS

Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture

ISSUE NO 29

JUL
2023



Special Edition: **Living Income, Challenges and Solutions
for Inclusive & Sustainable Food Systems**

Contact Us: [✉ contact@pisagro.org](mailto:contact@pisagro.org) [🌐 www.pisagro.org](http://www.pisagro.org) [📷 pisagro_secretariat](https://www.instagram.com/pisagro_secretariat/) [🐦](https://twitter.com/PISAgro) [ƒ](https://facebook.com/PISAgro) [in](https://linkedin.com/company/pisagro) PISAgro



Daftar Isi

- 03 Kata Pengantar
*Opening Remarks***
- 04 Tentang PISAgro**
- 05 About PISAgro**
- 06 Prolog**
Pendekatan Pendapatan Hidup Menuju Pertanian yang Inklusif
- 09 Prologue**
Living Income Approaches Towards Agricultural Inclusivity
- 12 Fitur**
Pembelajaran dari Pemetaan Disparitas
Pendapatan Hidup Petani Kakao di Peru
- 15 Feature**
*Learnings from Cocoa Farmers' Living Income
Disparities Mapping in Peru*
- 18 Sorotan - PISAgro 2.0 (Juli 2023)**
- 21 Highlights - PISAgro 2.0 (July 2023)**
- 24 Sorotan**
- 28 Highlights**
- 32 PISAgro Update**
Mengenal dan Memahami Metode Penghitungan
Living Income untuk Kesejahteraan Petani
- 34 Get to Know and Understand Living Income
Calculation Methods for Farmers' Welfare**
- 36 Kabar Agro**
Menyambut Bank Mandiri sebagai Anggota Baru PISAgro
- 28 Agro Update**
Welcoming Bank Mandiri as PISAgro's New Member
- 40 Kabar Agro**
Menyambut ID FOOD sebagai Anggota Baru PISAgro
- 42 Agro Update**
Welcoming ID FOOD as PISAgro's New Member
- 44 Kabar Agro**
Menyambut Kembali Unilever Indonesia sebagai Anggota Baru PISAgro
- 46 Agro Update**
Welcoming Back Unilever Indonesia as PISAgro's New Member

Tim Editorial

KONTEN

Fathan Oktrisaf
Ferial Lubis
Hendri Surya Widcaksana
Nadia Fairus
Sandra Pratiwi
GIZ Indonesia

DESAIN & TATA LETAK

Hendri Surya Widcaksana

KONTRIBUTOR FOTO

Anggota & Mitra
PISAgro, Istimewa

Kata Pengantar



Insan Syafaat

Direktur Eksekutif
Sekretariat PISAgro

Rekan-rekan yang Terhormat,

Kita berjumpa kembali di PISAgro News edisi Juli 2023. Genap setengah perjalanan di tahun 2023 telah ditempuh dengan baik, dan pemulihan ekonomi di sektor pertanian sudah terlihat dengan jelas. Ditambah lagi dengan momen Sensus Pertanian 2023 yang kembali hadir setelah terakhir kali diselenggarakan satu dekade silam.

Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi sedikit mengenai harapan kami kepada para pembaca. Sebagaimana yang kita semua ketahui, kita masih berada di momen Keketuanan ASEAN 2023 yang dimana melalui keketuanan ini, pertanian Indonesia dapat berkontribusi lebih baik di ASEAN guna sistem pangan ASEAN yang lebih baik.

Dalam nawala (newsletter) kali ini, kami akan membahas mengenai pendapatan hidup/*living income* serta peranannya di inklusivitas pertanian, serta pengalaman pemetaan kesenjangan pendapatan hidup petani kakao di Peru sebagai referensi pembelajaran untuk negara-negara lainnya.

Pada edisi kali ini, tak jauh dari topik pendapatan hidup yang menjadi fokus diskusi pada kali ini, kami juga menyajikan rekap dari Diskusi Kelompok Terarah "Mengenal dan Memahami Metode Penghitungan Living Income untuk Kesejahteraan Petani" yang

diselenggarakan bersama oleh Kelompok Kerja *Living Income*, yang terdiri dari sesi presentasi dan sesi diskusi.

Tak lupa juga, kami memperkenalkan anggota-anggota baru kami, yaitu Bank Mandiri, ID FOOD, dan Unilever Indonesia yang mengiringi perjalanan kami untuk pembangunan pertanian Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas dukungan yang telah diberikan sehingga Sekretariat PISAgro dapat terus melakukan kegiatan kami. Selamat membaca, dan kami harap nawala (newsletter) ini dapat memberikan perspektif baru untuk anda.

Opening Remarks



Insan Syafaat

Executive Director
PISAgro Secretariat

To our distinguished readers,

We meet again in the July 2023 edition of PISAgro News. Half of the journey in 2023 has been passed well, and the economic recovery in the agricultural sector is clearly visible. In addition, the 2023 Agricultural Census is back, after it was last held a decade ago.

On this occasion, we would like to share a little about our hopes for readers. As we all know, we are still in the moment of the 2023 ASEAN Chair where through this chairmanship, Indonesian agriculture can make a better contribution to ASEAN for a better ASEAN food system.

In this newsletter, we will discuss living income and its role in agricultural inclusiveness, as well as the experience of mapping the income gap of cocoa farmers in Peru as a learning reference for other countries.

In this edition, not far from the topic of living income which is the focus of the discussion this time, we also present a recap of the Focus Group Discussion "Knowing and Understanding Living Income Calculation Methods for Farmers' Welfare" jointly organized by the Living Income Working Group, consisting of presentation sessions and discussion sessions.

Also, we will not forget to introduce our new members, namely Bank Mandiri, ID FOOD, and Unilever Indonesia, who are accompanying us on our journey for a more inclusive and sustainable agricultural development in Indonesia.

Finally, we would like to thank all of you for the support that has been given so that the PISAgro Secretariat can continue to carry out our activities. Happy reading, and we hope this newsletter can give you a new perspective.



Kelompok Kerja

Setiap kelompok kerja wajib mengembangkan rantai pasok dengan lengkap dari hulu ke hilir dan menyusun rencana kerja yang meliputi kebutuhan permodalan, target produksi, target pembelian, target pelatihan petani, hingga waktu pelaksanaannya. Setiap rantai pasok melaksanakan berbagai proyek percontohan, mulai dari pelatihan petani mengenai pengelolaan kebun yang baik hingga membuka ketersediaan akses keuangan dan jaminan pembelian.

Sekretariat PISAgro

Insan Syafaat
Direktur Eksekutif

Sandra Pratiwi
Manajer Pelibatan Strategis

Hendri Surya Widcaksana
Manajer Komunikasi dan Media Sosial

Nadia Fairus
Manajer Perkantoran

Ferial Lubis
Konsultan Pendukung Hubungan Pemerintah

Fathan Oktrisaf
Manajer Proyek

	Agritech & Inovasi Digital		Kelapa Sawit
	Kakao		Kentang
	Kopi		Karet
	Jagung		Kelapa
	Susu		Padi
	Hortikultura		Sapi Potong
	Pemberdayaan Perempuan		Pengembangan Kapasitas
	Kemampu-telusuran		Pendapatan Hidup



Working Groups

Every working group is required to develop their chain supply from their downstream line to the upstream as well as formulating a working plan which includes capital needs, production target, purchasing order target, farmers' training, as well as their training schedules. Every supply chain is also required to carry out various pilot projects, ranging from farmers' training on proper plantation management methods to enabling financial access and purchase protection.

 Agritech & Digital Innovation	 Palm Oil
 Cocoa	 Potato
 Coffee	 Rubber
 Corn	 Coconut
 Dairy	 Rice
 Horticulture	 Cattle
 Women Empowerment	 Capacity Building
 Traceability	 Living Income

Sekretariat PISAgro

Insan Syafaat
Executive Director

Sandra Pratiwi
Strategic Engagement Manager

Hendri Surya Widcaksana
Communication and Social Media Manager

Nadia Fairus
Office Manager

Ferial Lubis
Government Relation Support Consultant

Fathan Oktrisaf
Project Management Officer

Prolog

Pendekatan Pendapatan Hidup Menuju Pertanian yang Inklusif

Hendri Surya Widcaksana



Pendapatan hidup semakin dianggap sebagai pendekatan penting untuk memastikan bahwa keuntungan petani kecil cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan keluarga mereka, serta untuk menghemat uang, membuat mereka lebih mungkin keluar dari kemiskinan. Standar internasional untuk menghitung pendapatan hidup diterima secara luas, dan terdapat komunitas praktik yang aktif untuk membantu penerapannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak upaya dan sumber daya telah dihabiskan untuk memperkirakan tolok ukur pendapatan hidup di berbagai negara dan untuk berbagai komoditas, lokasi pedesaan dan (peri)perkotaan, dan jenis pertanian. Data ini digabungkan dengan rapi dalam kumpulan data upah hidup dan pendapatan, yang berisi lebih dari 120 studi lapangan menyeluruh yang mengukur tolok ukur pendapatan hidup. Untuk wilayah yang sama, masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam estimasi tersebut.

Terlepas dari upaya yang berharga ini, penting untuk mempertimbangkan apakah persyaratan pendapatan hidup ini dapat dinilai dengan cara yang tidak terlalu memakan waktu. Dan apakah pendapatan hidup dapat ditentukan atau tidak dengan menggunakan sumber data yang dapat diakses. Akibatnya, kami memfokuskan perhatian kami pada perkiraan garis kemiskinan Bank Dunia sebagai proksi yang memungkinkan untuk tolok ukur pendapatan hidup. Data garis kemiskinan tersedia secara umum dan secara rutin memperhitungkan disparitas daya beli antar negara. Estimasi kemiskinan ini diperoleh dari data yang diperoleh dari sampel keluarga yang representatif secara nasional dalam survei rumah tangga.

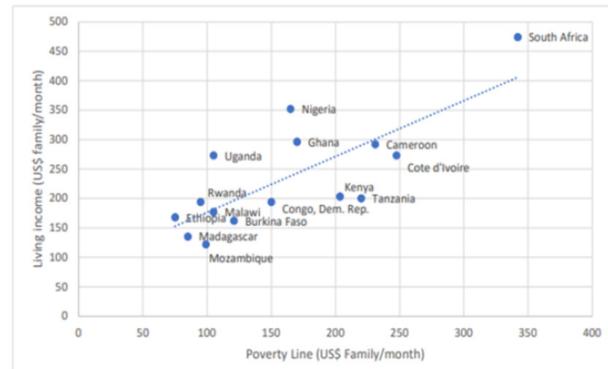
Hubungan antara garis kemiskinan dan pendapatan hidup

Penting untuk menyelidiki hubungan antara garis kemiskinan dan perkiraan pendapatan hidup. Kami menyelidiki apakah asosiasi yang sistematis dan bermakna seperti itu dapat

dendetksi menggunakan data yang ada. Ini memungkinkan kami untuk secara signifikan meminimalkan investasi waktu dalam pengukuran lapangan, membebaskan lebih banyak ruang untuk pengembangan pendekatan nyata untuk menutup kesenjangan pendapatan hidup saat ini. Hasilnya, kami mencoba mengevaluasi hubungan antara pendapatan hidup (keluarga per bulan) dan garis kemiskinan (per keluarga/bulan) untuk daerah pedesaan di 15 negara Afrika Sub-Sahara pada tahun 2021 (lihat Gambar 1). Upah hidup biasanya 50% lebih tinggi dari tingkat kemiskinan. Di beberapa negara (Uganda, Afrika Selatan, Nigeria, dan Ghana), tolok ukur pendapatan hidup dua kali lebih tinggi dari garis kemiskinan Bank Dunia, sementara di negara lain (Kenya dan Tanzania), perbedaannya kecil hingga tidak ada.

Kita dapat melakukan regresi dengan pendapatan hidup sebagai variabel dependen dan garis kemiskinan sebagai variabel independen. Pendapatan hidup menjadi fungsi intersep tetap (mencerminkan pembangunan tingkat negara yang ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, infrastruktur sosial dan fisik, urbanisasi, dan pendidikan) dan koefisien korelasi yang menunjukkan bagaimana garis kemiskinan berhubungan dengan pendapatan hidup (mencerminkan pengembalian sumber daya). Garis regresi (bertitik) menunjukkan bahwa sebagian besar data terdistribusi secara merata di sekitar nilai yang diharapkan, dan bahwa fungsi regresi menjelaskan 61% dari perbedaan tersebut. Selanjutnya, variabel penjelas (garis kemiskinan) sangat signifikan. Garis regresi bertitik memiliki tujuan sebagai berikut: Pendapatan Hidup Layak = $82 + 0,95^*$ (Tingkat Kemiskinan). Menurut grafik, rata-rata hubungan antara garis kemiskinan dan pendapatan hidup cukup kuat. Namun, negara tertentu (misalnya, Nigeria, Ghana, dan Uganda) memiliki kriteria pendapatan hidup yang lebih tinggi. Untuk memastikan bahwa rumah tangga di negara-negara tersebut memenuhi kriteria pendapatan hidup minimal mereka, kita perlu meningkatkan intersep sebesar 35-45%. Kerugiannya adalah negara-negara tertentu lainnya dengan garis kemiskinan yang sangat rendah (misalnya, Etiopia, Rwanda, Mozambik, dan Madagaskar) akan menerima pendapatan hidup 20-30% lebih banyak (dibandingkan dengan

tolok ukur mereka). Hal ini menunjukkan bahwa pemilahan yang lebih besar antara berbagai jenis negara diperlukan untuk sampai pada perkiraan pendapatan hidup rata-rata yang tepat.



Gambar 1: Hubungan antara pendapatan hidup dan garis kemiskinan di 15 negara SSA (2021).

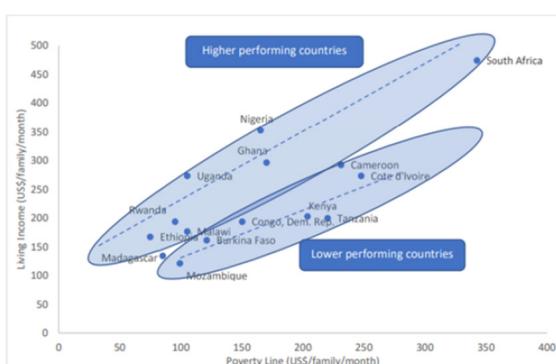
Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 1, negara-negara dengan kesenjangan pendapatan hidup yang relatif tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan ($>25\%$) ditandai dengan dinamika pertumbuhan yang lebih kuat dan perekonomian mereka juga cenderung lebih berorientasi pasar. Negara-negara 'berkinerja lebih tinggi' ini menghadapi tantangan yang lebih besar untuk menjamin bahwa pendapatan domestik memenuhi kondisi kehidupan minimum, karena risikonya tinggi dan akses ke inovasi untuk meningkatkan faktor produktivitas lahan dan tenaga kerja tetap terbatas. Di sisi lain, di beberapa negara SSA 'berkinerja rendah' lainnya, kesenjangan antara kemiskinan dan tingkat pendapatan hidup cukup kecil (bahkan terkadang negatif), pada dasarnya karena masih banyak produksi subsisten dan terbatasnya akses ke tanah, tenaga kerja dan pasar modal membatasi upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengurangi heterogenitas ini - dan dengan demikian menghindari terlalu banyak variasi antara negara-negara yang menanggapi persamaan pendapatan-kemiskinan yang sama - kami membagi sampel menjadi dua kelompok yang mempertahankan standar deviasi rendah pada parameter kunci dan dengan demikian memiliki rata-rata perbedaan kurang dari 7%. antara apa yang diberikan oleh persamaan sebagai perkiraan pendapatan hidup dan apa yang secara efektif didaftarkan oleh data lapangan. Kami mengidentifikasi dua kategori dinamika negara yang berbeda (lihat Gambar 2):

a) Negara dengan kinerja lebih tinggi : Pendapatan Hidup = $87 + 1,02^*(\text{Garis Kemiskinan})$ (N=8, R² = 85%)

Negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, fasilitas infrastruktur yang lebih baik, partisipasi pendidikan yang lebih tinggi, dan cakupan jaringan telepon seluler yang lebih luas memiliki sumber daya yang lebih baik (tercemermin dalam intersepsi yang lebih tinggi), dan oleh karena itu lebih mampu menerjemahkan pengurangan kemiskinan dengan perbaikan dalam kehidupan pendapatan (digambarkan oleh koefisien yang lebih tinggi dan kurva yang lebih curam). Negara-negara tipikal dalam kategori ini adalah Nigeria, Ghana, Ethiopia, dan Rwanda.

b) Negara dengan kinerja lebih rendah

Negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih rendah, keterbatasan infrastruktur, kinerja pendidikan yang lebih rendah, dan jangkauan telepon seluler yang lebih rendah memulai jalur pembangunan mereka pada tingkat pendapatan yang lebih rendah (ditunjukkan oleh intersep yang lebih kecil), dan membutuhkan lebih banyak pengurangan kemiskinan untuk mencapai peningkatan pendapatan hidup selanjutnya (tercemermin dalam koefisien yang lebih rendah dari kurva datar). Negara-negara tipikal dalam kategori ini adalah DR Congo, Burkina Faso, Kamerun, dan Mozambik.



Gambar 2: Kemiskinan pedesaan dan pendapatan hidup di negara-negara SSA dengan kinerja tinggi dan rendah (2021).

Kategori negara-negara ini jauh lebih homogen sehubungan dengan hubungan Garis Kemiskinan - Pendapatan Hidup dan oleh karena itu fungsi estimasi regresi dapat digunakan sebagai pendekatan yang sesuai untuk mengidentifikasi tolok ukur pendapatan hidup. Ini mungkin tidak hanya menghemat waktu dan uang yang saat ini diinvestasikan dalam pengukuran pendapatan hidup, tetapi

juga dapat digunakan dengan lebih baik untuk fokus pada jalur untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dalam praktiknya. Mengingat perbedaan struktural antara negara-negara SSA, kami mengharapkan dua prioritas strategis khusus:

- Untuk negara-negara berkinerja lebih tinggi di mana kondisi sumber daya awal lebih terjamin, pencapaian upah layak akan bergantung terutama pada strategi untuk meningkatkan daya tanggap terhadap pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan pengembalian sumber daya. Hal ini sebagian besar terkait dengan inovasi dalam hasil panen (yaitu pengurangan kesenjangan hasil), peningkatan campuran tanaman (yaitu diversifikasi tanaman) atau upah yang lebih tinggi dalam pekerjaan (di luar pertanian), yang tercermin dalam fungsi regresi yang lebih curam.
- Untuk negara-negara dengan kinerja lebih rendah yang memulai dengan infrastruktur fisik dan sosial yang lebih sedikit, peluang untuk mencapai dan meningkatkan tingkat pendapatan hidup cenderung didasarkan pada strategi untuk meningkatkan akses ke lahan dan/atau peluang untuk terlibat dalam pekerjaan di luar pertanian yang mengarah ke peningkatan. (atau munculnya intersep) dari fungsi regresi.

Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan garis kemiskinan dan pendapatan hidup dapat dianggap sebagai jalan pintas yang menarik untuk mengidentifikasi kondisi struktural di balik kesenjangan pendapatan hidup dan untuk mengidentifikasi peluang strategis untuk mendukung pengentasan kemiskinan sejalan dengan tolok ukur pendapatan hidup.

Sumber: Wageningen University & Research

Prologue

Living Income Approaches Towards Agricultural Inclusivity

Hendri Surya Widcaksana



Living income is increasingly regarded as a crucial approach for ensuring that smallholder farmers' profits are sufficient to fulfil their own basic requirements and those of their families, as well as to save some money, making them more likely to escape poverty. An international standard for calculating living income is widely accepted, and there is an active community of practise to assist its implementation.

In recent years, much effort and resources have been spent to estimating living income benchmarks in a wide range of nations and for various commodities, rural and (peri)urban locations, and farm types. This data is neatly bundled in the living-wage-and-income-dataset, which contains over 120 thorough field studies that quantify living income benchmarks. For the same region, there are still significant variances in these estimates.

Regardless of these valuable efforts, it is vital to consider whether these living income requirements

could be assessed in a less time-consuming manner. And whether or not living incomes could be determined using accessible data sources. As a result, we focused our attention on the World Bank's poverty line estimates as a possible proxy for the living income benchmark. Data on poverty lines is generally available and routinely takes into account disparities in purchasing power between countries. These poverty estimates are derived from data obtained from nationally representative samples of families in household surveys.

The relationship between the poverty line and the living income

It is worthwhile to investigate the relationship between poverty lines and estimates of living income. We investigated if such a systematic and meaningful association could be detected using existing data. This may allow us to significantly minimise time investments in field measurement, freeing up more space for the development of

genuine approaches to close the present living income gap.

As a result, we attempted to evaluate the relationship between (family per month) living income and the poverty line (per family/month) for rural areas in 15 Sub-Saharan African nations in 2021 (see Figure 1). Living wages are typically 50% higher than poverty levels. In some countries (Uganda, South Africa, Nigeria, and Ghana), the living income benchmark is twice as high as the World Bank poverty line, whilst in others (Kenya and Tanzania), the discrepancies are minor to non-existent.

We can do a regression with living income as the dependent variable and poverty line as the independent variable. Living income becomes a function of a fixed intercept (reflecting country-level development as determined by resource availability, social and physical infrastructure, urbanisation, and education) and a correlation coefficient that indicates how the poverty line relates to living income (reflecting resource return). The (dotted) regression line suggests that most data are reasonably evenly distributed around the expected values, and that the regression function explains 61% of the difference. Furthermore, the explanatory variable (the poverty line) is highly significant.

The dotted regression line serves the following purpose: $\text{Living Income} = 82 + 0.95 * (\text{Poverty Level})$. According to the graph, the average association between the poverty line and living income is fairly strong. However, certain nations (for example, Nigeria, Ghana, and Uganda) have higher living income criteria. To ensure that households in these countries meet their minimal living income criterion, we would need to increase the intercept by 35-45%. The disadvantage is that certain other nations with very low poverty lines (for example, Ethiopia, Rwanda, Mozambique, and Madagascar) would receive 20-30% more living income (in comparison to their benchmarks). This suggests that greater disaggregation between different types of countries is needed to arrive at an appropriate estimate of average living income.

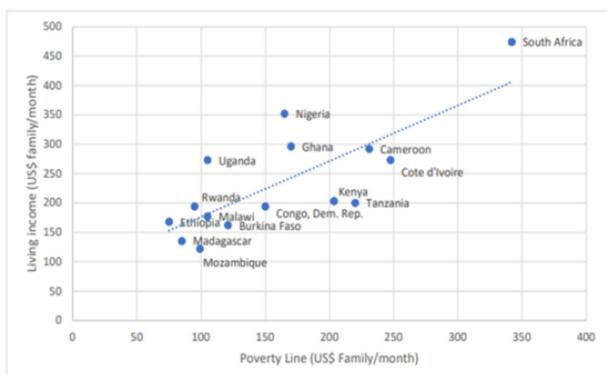


Figure 1: Relationship between living income and poverty lines in 15 SSA countries (2021).

As can be noted from Figure 1, countries with relatively high living income gaps compared to the poverty line ($> 25\%$) are characterized by stronger growth dynamics and their economies also tend to be more market-oriented. These 'higher-performing' countries face larger challenges to guarantee that domestic incomes satisfy minimum living conditions, since risks are high and access to innovations for improving factor productivity of land and labour remains limited. On the other hand, in several other 'lower performing' SSA countries, the gap between poverty and living income levels is fairly small (and sometimes even negative), basically because there is still a lot of subsistence production and limited access to land, labour and capital markets constrains efforts for poverty reduction.

In order to reduce this heterogeneity - and thus avoid too much variation between countries that respond to the same poverty-income equation - we divided the sample in two groups that maintain low standard deviations on the key parameters and thus have on average less than 7% differences between what the equation delivers as living income estimate and what the field data effectively register. We identify two different categories of country dynamics (see Figure 2):

a) Higher performing countries : Living Income = $87 + 1.02 * (\text{Poverty Line})$ (N=8, R² = 85%)

Countries with higher rates of economic development, better infrastructure facilities, higher enrolment in education and more coverage of mobile phone networks have more favourable resource endowments (reflected by the higher intercept), and are therefore better able to translate reductions in poverty with improvements in living incomes (illustrated by the higher coefficient and

the steeper curve). Typical countries in this category are Nigeria, Ghana, Ethiopia and Rwanda.

b) Lower performing countries

Countries with lower levels of economic development, infrastructure limitations, less educational performance and lower mobile phone coverage start their development path at a lower income level (shown by the smaller intercept), and need more reduction in poverty to reach a subsequent improvement in living income (reflected in the lower coefficient of the flatter curve). Typical countries in this category are DR Congo, Burkina Faso, Cameroon and Mozambique.

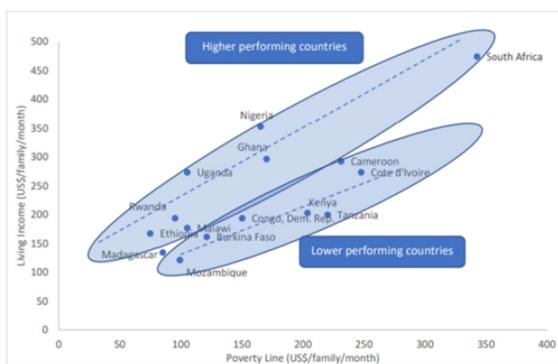


Figure 2: Rural poverty and living income in higher and lower-performing SSA countries (2021).

These categories of countries are far more homogeneous with respect to the Poverty Line - Living Income relationship and therefore the estimated regression function can be used as a suitable approximation for identifying the living income benchmark. This may not only save time and money that is nowadays invested in living income measurement, but can also be used better to focus on pathways for reducing the income gap in practice. Given the structural differences between SSA countries, we would expect two specific strategic priorities:

1. For higher performing countries where initial resource conditions are better guaranteed, reaching living wages will depend especially on the strategies for increasing the responsiveness to poverty reduction by improving the return to resources. This is mostly related to innovations in crop yields (i.e. yield gap

reduction), improvements in crop mix (i.e. crop diversification) or higher wages in (off-farm) work, reflected in a steeper regression function.

2. For lower performing countries that start with less physical and social infrastructure, opportunities for reaching and improving living income levels are likely to be based on strategies for enhancing access to land and/or opportunities for engagement in off-farm employment that lead to an upward shift (or rise of the intercept) of the regression function.

Better understanding of the relationship poverty line and living income can be considered as an attractive shortcut for identifying structural conditions behind living income gaps and to identify strategic opportunities to support poverty reduction in line with living income benchmarks.

Source: Wageningen University & Research

Fitur

Pembelajaran dari Pemetaan Disparitas Pendapatan Hidup Petani Kakao di Peru

Hendri Surya Widcaksana



Sebuah studi industri menyoroti tingkat pendapatan hidup yang dibutuhkan dan tantangan operasional bagi petani kakao yang bekerja di Peru, menyoroti kesenjangan pendapatan antara standar industri yang lebih luas dan pendapatan garis kemiskinan seperti yang didefinisikan oleh pemerintah negara tersebut, lapor Neill Barston.

Studi yang dibiayai bersama oleh Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan didukung oleh Platform Swiss untuk Kakao Berkelanjutan (SWISSCO), menemukan bahwa Amerika Selatan adalah pemain terbesar kedelapan dalam industri ini, serta produsen kopi terbesar ketujuh., menyoroti pentingnya kedua tanaman tersebut bagi sektor pertanian negara. Menurut kelompok tersebut, minat yang meningkat dalam menetapkan tolok ukur pendapatan hidup di Peru mendorong Anker Research Network untuk menugaskan sebuah penelitian untuk menilai

pendapatan hidup bagi keluarga beranggotakan empat orang.

Penelitian ekstensif ini menghitung pendapatan yang dibutuhkan rumah tangga untuk mempertahankan kualitas hidup yang wajar. Ini berusaha untuk menghitung jumlah uang yang dibutuhkan orang dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, pakaian, transportasi, komunikasi, kebutuhan rumah, rekreasi, dan dana darurat.

Patokan Pendapatan Hidup Layak adalah alat yang berguna dalam kolaborasi internasional. Sejauh ini, tidak ada tolok ukur serupa yang diukur untuk petani kakao, dan penulis penelitian merasa ini mungkin menjadi komponen utama kebijakan publik, dengan empat wilayah yang dianalisis - San Martn, Cajamarca, Junn, dan Cusco - dengan total sekitar 492.000 kopi dan petani kakao.

Di San Martin, perkiraan biaya hidup keluarga (yaitu pendapatan hidup) untuk empat distrik penghasil kakao dan kopi di Peru pada Mei/Juni 2022 adalah PEN 2.371. Ini setara dengan 638 dolar AS (USD). Pendapatan hidup di wilayah lain yang disurvei sangat tinggi: Cajamarca PEN 2.146 (USD 576). PEN 2.101 (USD 2.101) untuk Junn. PEN 2.359 (USD 665) di Cusco. Pendapatan hidup rata-rata keempat wilayah tersebut adalah PEN 2.244 (USD 604) (lihat Gambar 2 di bawah). Ini adalah pendapatan bersih bulanan yang diperlukan untuk keluarga normal beranggotakan empat orang (dua orang dewasa dan dua anak) untuk menutupi biaya makanan bergizi murah, rumah sehat yang layak, perawatan kesehatan yang memadai, pendidikan sekolah menengah untuk anak-anak, pakaian, dan semua lainnya. pengeluaran yang diperlukan.

Menurut Swissco, temuan tolok ukur pendapatan hidup mengisi kesenjangan penelitian dan memberikan informasi penting tentang biaya kualitas hidup yang dapat diterima untuk keluarga di daerah penghasil kakao, meskipun mengakui bahwa diperlukan lebih banyak penelitian. Sektor kakao dan kopi Peru berusaha untuk menggabungkan data yang ada untuk menghitung perbedaan pendapatan, berkat kerja rencana aksi nasional pemerintah. Kementerian Pertanian, UNDP Peru, Laboratorium Pangan Berkelanjutan, Solidaridad, dan Rikolto, misalnya, sedang mengembangkan strategi untuk mengukur kesenjangan pendapatan di wilayah Cajamarca dan San Martin, dengan tujuan menyelaraskan metrik pendapatan orang kaya dengan pendapatan Peru. Rencana Aksi Nasional.

Selain itu, sebagai bagian dari pendekatan pendapatan hidup komprehensif mereka, LSM Fairtrade Max Havelaar bermaksud menggunakan hasil studi untuk menghasilkan harga referensi pendapatan hidup untuk kopi dari Peru (akan diterbitkan pada kuartal keempat tahun 2023).

Deforestasi

Dalam pencapaian penting lainnya untuk Swissco, organisasi tersebut baru-baru ini menyelenggarakan acara penting di Bern, Swiss, dengan Soy and Palm Oil Network dan Coffee Interest Group memutuskan untuk bersama-sama menghadapi tantangan deforestasi di masa depan di Gurten di Bern pada 28 Juni 2023.

Menurut organisasi keberlanjutan, Menteri Air dan Hutan Pantai Gading, Laurent Tchagba, menyatakan bahwa alasan hilangnya hutan paling baik diatasi dengan bekerja sama sebanyak mungkin dengan semua pihak yang terlibat di lapangan. Khususnya, menurut Swissco, rata-rata 4,7 juta hektar hutan terbakar secara global setiap tahun antara 2010 dan 2020. Peningkatan lahan pertanian merupakan salah satu penyebab utama deforestasi. Perkebunan kopi, kakao, kelapa sawit, dan kedelai semuanya berkontribusi terhadap deforestasi.

Secara kritis, aturan UE yang baru, Peraturan Produk Bebas Deforestasi (EUDR), mulai berlaku. Mulai tahun 2025, kriteria kerangka kerja baru akan berlaku untuk impor kopi, kakao, minyak sawit, dan kedelai ke UE. Perundang-undangan menuntut bisnis untuk menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan atau degradasi hutan.

Sebagai bagian dari uji tuntas mereka untuk menjamin bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi atau degradasi hutan, bisnis harus mengidentifikasi koordinat geografis yang tepat di mana komoditas pertanian diproduksi.

Inisiatif empat sektor bertemu dengan perwakilan dari politik, bisnis, dan masyarakat sipil untuk membahas apa arti peraturan UE yang baru bagi Swiss dan sektor komoditas yang terlibat, apa yang sudah dilakukan, dan solusi apa yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan dalam komoditas pertanian. rantai pasokan.

Selanjutnya, Mr Laurent Tchagba, Menteri Air dan Hutan Pantai Gading, menekankan perlunya melindungi hutan di negaranya, Pantai Gading, yang telah terkena dampak signifikan selama enam dekade terakhir, dengan negara tampaknya kehilangan sekitar 80% hutannya. daerah.

“Kita harus mengatasi akar penyebab deforestasi dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan,” kata Laurent Tchagba. Hal ini sudah terlihat di negaranya, di mana program untuk menjaga hutan dan regenerasi tutupan hutan telah dilaksanakan.

Tiga Area Fokus

Para peserta mengidentifikasi tiga bidang tindakan. Para panelis sepakat bahwa Swiss telah melakukan banyak hal di empat bidang komoditas dan akan terus melakukannya terlepas dari peraturan UE. Terlepas dari kenyataan bahwa pengaruh dan prasyarat di empat sektor bahan mentah bervariasi, upaya sektor bercita-cita untuk memanfaatkan potensi tindakan kolaboratif untuk memastikan rantai pasokan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, badan-badan yang terkumpul menguraikan tiga bidang kegiatan di mana mereka bertujuan untuk berkolaborasi di masa depan bulan lalu:

1. Kemampotelusuran: Kemajuan kolaboratif dan penyelarasan standar, serta pemanfaatan sinergi dalam manajemen data dan alat data, sangat penting untuk meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan, pada akhirnya, dampak berkelanjutan. Orientasi terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global memperkuat proses harmonisasi. Dalam konteks ini, teknologi digital baru menjadi semakin penting. "Standar keberlanjutan seperti FairTrade, Roundtable on Sustainable Palm Oil dan Rainforest Alliance mendukung pelaku rantai nilai untuk menghindari deforestasi dengan menawarkan data ketertelusuran yang relevan dan terverifikasi yang mempertahankan identitas produk bersertifikat di sepanjang rantai pasokan.

"Data ini dapat membantu perusahaan melakukan penilaian risiko deforestasi," kata Joshua Wickerham, pembicara di konferensi International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance (ISEAL).

2. Pendekatan bentang alam: Upaya empat sektor bekerja sama untuk mengembangkan dan melaksanakan metode bentang alam untuk pelestarian dan restorasi hutan. Anggota proyek bekerja untuk memberdayakan petani agar secara efektif menggunakan praktik pertanian cerdas iklim untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan ketahanan terhadap perubahan iklim di wilayah sumber.
3. Investasi: Transisi ke praktik pertanian yang unggul dan ramah iklim memerlukan investasi awal yang signifikan dalam pelatihan, layanan

konsultasi, bahan tanaman, dan kompensasi finansial untuk petani skala kecil. Akibatnya, potensi kemitraan publik-swasta, dana iklim, dan sumber daya keuangan lokal harus dimanfaatkan dan diintegrasikan dengan baik.

Sumber: Confectionery Production

Feature

Learnings from Cocoa Farmers' Living Income Disparities Mapping in Peru

Hendri Surya Widcaksana



An industry study has placed a spotlight on required living income levels and operating challenges for cocoa farmers working in Peru, has highlighted the income gap between broader industry standards and poverty line earning as defined by the nation's government, reports Neill Barston.

The study, co-financed by Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and supported by the Swiss Platform for Sustainable Cocoa (SWISSCO), found that South America is the eighth largest player in the industry, as well as the seventh largest coffee producer, highlighting the importance of the two crops to the country's agricultural sector.

According to the group, increased interest in setting a living income benchmark in Peru prompted the Anker Research Network to commission a research

to assess the living income for a typical family of four.

This extensive research calculated the income needed for a household to maintain a reasonable quality of life. It seeks to calculate the amount of money required for people and families to meet their basic needs, such as nourishment, housing, healthcare, education, clothes, transportation, communication, home necessities, recreation, and emergency funds.

A Living Income Benchmark is a useful tool in international collaboration. So far, no similar benchmark has been measured for cocoa growers, and the study's authors feel it might be a major component of public policy, with the four regions analysed - San Martn, Cajamarca, Junn, and Cusco - totaling roughly 492 000 coffee and cocoa farmers.

In San Martin, the predicted family living expenses (that is, living income) for the four cocoa- and coffee-growing districts of Peru in May/June 2022 were PEN 2,371. This is equivalent to 638 US dollars (USD). The living income in the other regions surveyed is very high: Cajamarca PEN 2,146 (USD 576). PEN 2,101 (USD 2,101) for Junn. PEN 2,359 (USD 665) in Cusco. The four areas' average living income is PEN 2,244 (USD 604) (see Figure 2 below). This is the monthly net income required for a normal family of four (two adults and two children) to cover the costs of a low-cost nutritious diet, decent healthy home, enough healthcare, secondary school education for children, clothing, and all other necessary expenses.

According to Swissco, the findings of the living income benchmark fill a research gap and provide vital information on the expenses of an acceptable quality of living for families in cocoa-growing regions, albeit it admits that more research is needed.

Peruvian cocoa and coffee sectors are attempting to combine existing data to quantify the income disparity, thanks to work by the government's national action plans. The Ministry of Agriculture, UNDP Peru, Sustainable Food Lab, Solidaridad, and Rikolto, for example, are developing a strategy to measure the income gap in the Cajamarca and San Martin regions, with the goal of aligning the metric of living affluent income with Peru's National Plan of Action.

Furthermore, as part of their comprehensive living income approach, the NGO Fairtrade Max Havelaar intends to use the study results to generate a living income reference price for coffee from Peru (to be published in the fourth quarter of 2023).

Deforestation event

In another significant achievement for Swissco, the organisation recently organised an important event in Bern, Switzerland, with the Soy and Palm Oil Network and the Coffee Interest Group deciding to confront the challenge of deforestation together in the future at the Gurten in Bern on 28 June 2023.

According to the sustainability organisation, the Ivory Coast's Minister of Water and Forests,

Laurent Tchagba, stated that the reasons of forest loss are best addressed by cooperating as much as possible with all parties involved on the ground.

Notably, according to Swissco, an average of 4.7 million hectares of forest were burned globally each year between 2010 and 2020. The increase of agricultural land is one of the primary causes of deforestation. Coffee, cocoa, palm oil, and soy plantations all contribute to deforestation.

Critically, a new EU rule, the Deforestation-Free Products Regulation (EUDR), went into effect. From 2025, new framework criteria will apply to the import of coffee, cocoa, palm oil, and soy into the EU. The legislation demands businesses to demonstrate that their supply chains do not contribute to forest destruction or degradation.

As part of their due diligence to guarantee that their products do not contribute to deforestation or forest degradation, businesses must identify the exact geographical coordinates of where the agricultural commodity is produced.

The four sector initiatives met with representatives from politics, business, and civil society to discuss what the new EU regulation means for Switzerland and the commodity sectors involved, what is already being done, and what solutions are needed to ensure transparency and sustainability in agricultural commodity supply chains.

Furthermore, Mr Laurent Tchagba, Ivory Coast's Minister of Water and Forests, stressed the necessity of protecting the forest in his nation, Ivory Coast, which has been significantly impacted over the last six decades, with the country apparently losing around 80% of its forested regions.

"We must address the root causes of deforestation and work closely with all stakeholders," says Laurent Tchagba. This is already obvious in his country, where programmes to maintain forests and regenerate forest cover have been implemented.

Three Focus Areas

The participants identified three action areas. The panellists agreed that Switzerland has already done a lot in the four commodity areas and that it will continue to do so regardless of EU rules. Despite

the fact that the affectedness and preconditions in the four raw material sectors varies, sector efforts aspire to leverage the potential of collaborative actions to ensure sustainable supply chains.

In this regard, the collected bodies outlined three areas of activity in which they aim to collaborate in the future last month:

1. Traceability: The collaborative advancement and alignment of standards, as well as the utilisation of synergies in data management and data tools, are critical for increased transparency, traceability, and, ultimately, sustainable impact. Orientation towards globally recognised sustainability standards strengthens the harmonisation process. In this context, new digital technologies are becoming increasingly important. "Sustainability standards like FairTrade, the Roundtable on Sustainable Palm Oil and Rainforest Alliance support value chain actors to avoid deforestation by offering relevant and verified traceability data that preserves the identity of certified products along the supply chain.

"This data can help companies conduct deforestation risk assessments," says Joshua Wickerham, a speaker at the International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) conference.

2. Landscape approaches: The four sector efforts are working together to develop and execute landscape methods to forest preservation and restoration. Members of the projects work to empower farmers to effectively use climate-smart agriculture practises in order to increase biodiversity and resilience to climate change in source regions.
3. Investments: The transition to excellent, climate-friendly farming practises necessitates significant initial investments in training, consultancy services, plant material, and financial recompense for small-scale growers. As a result, the potential of public-private partnerships, climate funds, and local financial resources should be properly leveraged and integrated.

Source: Confectionery Production

Sorotan

Capaian Dasbor PISAgro 2.0 Saat Ini - Juli 2023

Fathan Oktrisaf, Hendri Surya Widcaksana, Sandra Pratiwi



PISAGRO 2.0 DASHBOARD



68
desa

18.926
petani

25.551
ha lahan

OVERVIEW

GROWTH

37% dari total petani memiliki **akses kepada bantuan finansial**
7.001 dari 18.926 (KUR, pinjaman, hibah)

77% dari total **hasil panen** petani **dibeli langsung oleh perusahaan**
(114.829 ton hasil panen)

22% dari total petani berpartisipasi dalam **lembaga koperasi**
4.096 dari 18.926

RESILIENCE

42%
30 dari 68

desa didukung oleh perusahaan dalam kualitas **ketahanan hidup**



2
setidaknya

fasilitas penunjang kesehatan petani beroperasi dan didukung oleh perusahaan di setiap desa

Jenis **aktivitas** yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan **kualitas kesehatan** petani:

35
kampanye

32 (dilakukan 1-2 kali dalam setahun)
sosialisasi

SUSTAINABILITY

45%
31 dari 68

desa didukung oleh perusahaan dalam implementasi **pertanian berkelanjutan**

48%
7.472 dari 14.734 ha lahan

Jenis **aktivitas** yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung petani mengimplementasikan **manajemen limbah**:

56
kampanye

50
sosialisasi

58
pelatihan

(dilakukan 2-3 kali dalam setahun)

GROWTH

37%
7.001 dari 18.926

dari total petani memiliki **akses kepada bantuan finansial**
(KUR, pinjaman, hibah)

77%

dari total **hasil panen** petani **dibeli langsung oleh perusahaan**
(88.986 ton hasil panen)

21%
4.096 dari 18.926

dari total petani berpartisipasi dalam **lembaga koperasi**

31%

dari total petani berpartisipasi dalam **pelatihan praktik pertanian baik**
yang dilakukan oleh perusahaan
(dalam 2-3 kali setahun)

30%
5.761 dari 18.926

dari total petani telah mengimplementasikan **Praktik Pertanian yang baik¹** dalam setiap proses produksinya

→ **3.266** petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam **input-sourcing**

→ **3.026** petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam **penanganan pasca-panen**

→ **3.185** petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam operasi pertanian

Rata-rata pendapatan petani per bulan dari tiap komoditas:



4.200.000



5.000.000



2.500.000



3.500.000

¹ Praktik Pertanian Baik (PPB/GAP) adalah pedoman yang umum digunakan oleh petani untuk membantu upaya implementasi praktik pertanian berkelanjutan dan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk

RESILIENCE



setidaknya

2

fasilitas penunjang kesehatan petani beroperasi dan didukung oleh perusahaan di setiap desa

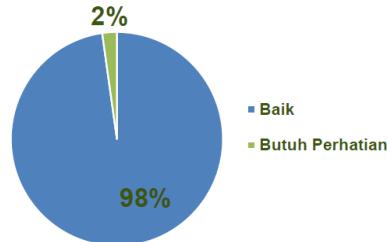
33%

6.253 dari 18.926

total petani
mengimplementasikan praktik
pencegahan bencana

- 5.097 petani menggunakan peralatan yang memadai untuk menghadapi bencana iklim
- 5.062 petani mengimplementasikan **praktik pertanian** yang dapat mencegah bencana kebakaran
- 5.995 petani mengimplementasikan praktik pertanian yang dapat mencegah bencana banjir

Rata-rata kondisi kesehatan petani dalam setiap desa²



Jenis **aktivitas** yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan **kualitas kesehatan** petani:

35 **32**

kampanye sosialisasi

Dilakukan 1-2 kali
dalam setahun

2 berdasarkan kondisi data check-up tahunan

SUSTAINABILITY



48%

7.472 dari 14.734 ha lahan

dari total lahan kelapa sawit perusahaan berada
di bawah **pengelolaan lahan berkelanjutan**

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung petani dalam implementasi:

Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

22 kampanye **26** sosialisasi **25** pelatihan
dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Manajemen Limbah

56 kampanye **50** sosialisasi **58** pelatihan
dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Manajemen Biodiversitas

3 kampanye **2** sosialisasi **3** pelatihan
dilakukan 1 kali setiap tahunnya

Manajemen Karbon dan Gas Rumah Kaca

30 kampanye **30** sosialisasi **16** pelatihan
dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Highlights

Achievement of PISAgro 2.0

Dashboard to Date - July 2023

Fathan Oktrisaf, Hendri Surya Widcaksana, Sandra Pratiwi



OVERVIEW

GROWTH

37% of smallholders have the **access to financial support** (KUR, loans, grants)
7.001 out of 18.926

77% of total harvest by smallholders are sold to **partnered companies** (114.829 tons harvest)

22% of smallholders participated in **cooperative**
4.096 out of 18,926

RESILIENCE

42%

30 out of 68

villages supported by company on their **resilience** capability



at least
2

health facilities operated in each village supported by company

Type of **activities** conducted by company to increase smallholders' **health condition quality**:

35
campaign

32
socialization

occurring 1-2 times a year

45%

31 out of 68

villages supported by company to implement **sustainability** practice

48%

7.472 out of 14.734 ha of land

Type of **activities** conducted by company to support smallholders implement **management waste**:

56
campaign

50
socialization

58
trainings

occurring 2-3 times a year

GROWTH

37%
7.001 out of 18.926

of smallholders have the **access to financial support** (KUR, loans, grants)

77%

of total harvest by smallholders are sold to **partnered companies** (114.829 tons harvest)

22%
4.096 out of 18,926

of smallholders participated in **cooperative**

31%

of smallholders participated in **GAP** training conducted by company (occurring 2-3 times a year)

30%

5.761 out of 18.926

of smallholders implemented **Good Agricultural Practice (GAP)** in their whole production process

→ **3.266** smallholders implement Good Agricultural Practice in **input-sourcing** process

→ **3.026** smallholders implement Good Agricultural Practice in **post-harvest** process

→ **3.185** smallholders implement Good Agricultural Practice in **farming operations** process

Smallholders' **average income per month** in each commodities²:



4.2 Million IDR



5.0 Million IDR



2.5 Million IDR



3.5 Million IDR

¹ Good Agricultural Practice (GAP) is a guideline commonly used by smallholders to help them implement sustainability practice in agriculture and to ensure the product quality & safety

RESILIENCE



at least

2

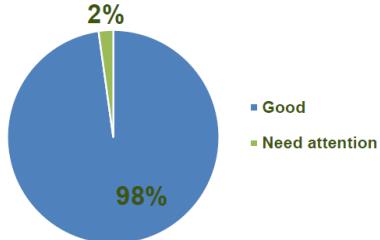
health facilities operated in each village supported by company (puskesmas, posyandu, hospital)

33%

6.253 out of 18.926
of smallholders implemented
act of prevention on calamity

- 5.097 smallholders used adequate equipment and tools to prevent climate calamity occurrence
- 5.062 smallholders implemented agricultural practice to prevent fire calamity occurrence
- 5.995 smallholders implemented agricultural practice to prevent flood calamity occurrence

Smallholders' average health condition in each village²



Type of **activities** conducted by company to increase smallholders' **health condition** quality:

35 campaign **32** socialization

occurring
1-2 times
a year

² based on annual check-up conducted



SUSTAINABILITY

48%

7.472 out of 14.734 ha of land

of total land farm from palm oil
companies are under implementation
of land sustainable management

Activities conducted by company to support smallholders on implementing:

Land Sustainable Management

22 **26** **25** occurring 2-3
campaign socialization training times a year

Biodiversity Management

3 **2** **3** occurring 1
campaign socialization training times a year

Waste Management

56 **50** **58** occurring 2-3
campaign socialization training times a year

GHG & Carbon Management

30 **30** **16** occurring 2-3
campaign socialization training times a year

Sorotan

1. Rapat Kerja Semester II PISAgro 2023

Pada tanggal 15 Juni 2023, PISAgro mengadakan rapat kerja sekaligus Halalbihalal pasca-Idulfitri dengan judul "Memasuki Semester 2 - 2023: Perkuat Jejaring PISAgro" yang diselenggarakan secara luring di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Pada acara ini, dewan pengurus dan anggota-anggota PISAgro serta mitra-mitra dari seluruh Indonesia maupun mancanegara bertukar pikiran, berbagi pengalaman serta memperoleh masukan langsung untuk strategi pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Acara ini dihadiri oleh seluruh anggota dewan pengurus PISAgro, anggota PISAgro, serta mitra-mitra yang terkait, beberapa diantaranya adalah Bapak Franky O. Widjaja selaku co-chair PISAgro, Bapak Bayu Krishnamurthi selaku anggota dewan pengurus PISAgro, serta Beverley Postma dari Grow Asia.

2. Rapat Pengurus dan Rapat Umum PISAgro #2 2023

Pada 21 Juni 2023, Sekretariat PISAgro mengadakan rapat pengurus dan rapat umum dengan judul "How to Scale Up Our Inclusive Closed Loop Model: ASEAN and Other Opportunities" yang diselenggarakan secara daring. Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota dewan pengurus PISAgro, maupun anggota-anggota PISAgro secara keseluruhan.

Pada rapat kali ini, dibahas mengenai langkah strategis untuk mempromosikan purwarupa model Inclusive Closed-loop ke tingkat ASEAN, serta pengenalan anggota-anggota baru PISAgro, yakni Bank Mandiri, ID Food, dan Unilever Indonesia.

3. Festival Lestari 2023

Pada tanggal 23-25 Juni 2023, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro untuk menghadiri Festival Lestari ke-5 yang diselenggarakan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Festival Lestari yang dilaksanakan di Kabupaten Sigi ini merupakan pelaksanaan festival ke-5 dengan tema "Tumbuh Lebih Baik" dan ini pertama kalinya festival dilaksanakan secara luring.

Festival Lestari adalah wadah bersama untuk merayakan dan mempromosikan kemajuan implementasi pembangunan lestari bagi kabupaten anggota dan jejaring mitra Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Festival Lestari hadir sebagai sarana untuk membuka dan mempererat gotong royong untuk cita-cita kita bersama mencapai pembangunan lestari di daerah.

4. Forum Diskusi Terpusat "Mengenal dan Memahami Metode Penghitungan Living Income untuk Kesejahteraan Petani"

Pada tanggal 12 Juli 2023, Sekretariat PISAgro mengadakan forum diskusi terpusat yang berjudul "Mengenal dan Memahami Metode Penghitungan Living Income untuk Kesejahteraan Petani" yang diselenggarakan secara luring di Menara Indofood, Jakarta.

Acara ini terdiri dari dua sesi, yakni sesi presentasi dan sesi diskusi. Untuk sesi presentasi sendiri, dibuka oleh Bapak Franky Welirang selaku Chairman dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan Bapak Lucius Dinto selaku ketua Kelompok Kerja Living Income, serta sesi presentasi dari Bapak Ellan Satriawan dari UGM dan Bapak Edward Manihuruk dari GIZ Indonesia.

Pada kesempatan ini, dihasilkan keluaran berupa tindaklanjut mengenai penerapan Living Income di masa depan, beserta potensi pendekatan yang relevan dan berkelanjutan untuk petani.

5. Audiensi PISAgro dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tanggal 14 Juli 2023, Sekretariat PISAgro menerima perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk sebuah audiensi yang diselenggarakan secara luring di Sinarmas Land Plaza, Jakarta. Pertemuan ini membahas mengenai Sensus Pertanian 2023 (ST2023) serta langkah promosi ke masing-masing anggota dan mitra PISAgro untuk berpartisipasi pada ST2023.

Pada kesempatan ini, dihasilkan keluaran berupa dukungan PISAgro untuk BPS guna menyukseskan Sensus Pertanian 2023.

6. Pameran Apkasi Otonomi Expo 2023

Pada tanggal 20 Juli 2023, Sekretariat PISAgro menghadiri pameran APKASI Otonomi Expo 2023 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Kegiatan yang dipusatkan di Hall 3 dan 3A, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’aruf Amin, Kamis (20/7/2023).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pameran ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Kementerian, BUMN/BUMD, Perusahaan Nasional dan Multinasional serta dikunjungi oleh para buyer dan investor dari dalam dan luar negeri serta masyarakat umum lainnya.

Selain pameran, AOE 2023 juga akan menggelar Forum Bisnis yang akan mempertemukan secara langsung antara daerah dengan para buyer yang membutuhkan produk-produk unggulan daerah dan para investor yang ingin menanamkan investasinya di daerah.

7. Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Pada tanggal 31 Juli 2023, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro dalam acara pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 2023-2028 di Grand Indonesia, Jakarta. Dalam kesempatan itu, turut hadir pula Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, serta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Pada kesempatan kali ini, PISAgro mendapatkan kehormatan sebagai bagian dari anggota DPN Apindo periode 2023-2028 di bidang pertanian, yang dimana saat ini, Apindo dipimpin oleh Ibu Shinta Widjaja Kamdani selaku Ketua Umum Apindo periode 2023-2028.

Sorotan - Juli 2023



Highlights

1. PISAgro Semester II Working Meeting 2023

On June 15 2023, PISAgro held a post-Idul Fitri Halalbihalal work meeting entitled "Entering Semester 2 - 2023: Strengthening the PISAgro Network" which was held offline at the Ayana Midplaza Hotel, Jakarta.

At this event, the board of directors and members of PISAgro as well as partners from all over Indonesia and abroad exchanged ideas, shared experiences and obtained direct input for sustainable and environmentally friendly agricultural development strategies.

This event was attended by all members of the PISAgro board of directors, members of PISAgro, as well as related partners, some of whom were Mr. Franky O. Widjaja as co-chair of PISAgro, Mr. Bayu Krishnamurthi as member of the board of PISAgro, and Beverley Postma from Grow Asia.

2. PISAgro Board Meeting & General Meeting #2 2023

On 21 June 2023, the PISAgro Secretariat held a board meeting and general meeting entitled "How to Scale Up Our Inclusive Closed Loop Model: ASEAN and Other Opportunities" which was held online. This meeting was attended by all members of the PISAgro board of directors, as well as PISAgro members as a whole.

At this meeting, strategic steps were discussed to promote the prototype of the Inclusive Closed-loop model to the ASEAN level, as well as the introduction of new PISAgro members, namely Bank Mandiri, ID Food and Unilever Indonesia.

3. Festival Lestari 2023

On 23-25 June 2023, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat to attend the 5th Festival Lestari which was held in Sigi Regency, Central Sulawesi. Festival Lestari which is being held in Sigi Regency is the 5th festival with the theme "Growing Better" and this is the first time the festival has been held offline.

Festival Lestari is a joint forum to celebrate and promote the progress of implementing sustainable development for member districts and the Lingkar Temu Kabupaten Lestari partner network. Festival Lestari is here as a means to open and strengthen mutual cooperation for our common goal of achieving sustainable development in the region.

4. FGD "Knowing and Understanding Living Income Calculation Methods for Farmers' Welfare"

On July 12, 2023, the PISAgro Secretariat held a focus group discussion entitled "Knowing and Understanding Living Income Calculation Methods for Farmers' Welfare" which was held offline at Indofood Tower, Jakarta.

This event consisted of two sessions, namely a presentation session and a discussion session. The presentation session itself was opened by Mr. Franky Welirang as Chairman of PT Indofood Sukses Makmur Tbk and Mr. Lucius Dinto as chairman of the Living Income Working Group, as well as presentation sessions from Mr. Ellan Satriawan from UGM and Mr. Edward Manihuruk from GIZ Indonesia.

On this occasion, outputs were produced in the form of follow-up

regarding the application of Living Income in the future, along with potential relevant and sustainable approaches for farmers.

5. PISAgro Audience with the Central Bureau of Statistics (BPS)

On 14 July 2023, the PISAgro Secretariat received representatives from the Central Statistics Agency (BPS) for an audience which was held offline at Sinarmas Land Plaza, Jakarta. This meeting discussed the 2023 Agricultural Census (ST2023) and promotional steps for each PISAgro member and partner to participate in ST2023.

On this occasion, output was produced in the form of PISAgro support for BPS to make the 2023 Agricultural Census a success.

6. APKASI Otonomi Expo 2023

On July 20 2023, the PISAgro Secretariat attended the APKASI Autonomy Expo 2023 exhibition organized by the Association of Indonesian District Governments (Apkasi). The activities which were centered in Hall 3 and 3A, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, were officially opened by the Indonesian Vice President K.H. Ma'aruf Amin.

As in previous years, this exhibition was attended by Local Governments, Provincial Governments, Ministries, BUMN/BUMD, National and Multinational Companies and was visited by buyers and investors from within and outside the country as well as the general public.

In addition to the exhibition, AOE 2023 will also hold a Business Forum which will bring together regions directly with buyers who need regional superior products and investors who wish to invest in the region.

7. Inauguration of the National Leadership Council of the Indonesian Employers' Association (APINDO)

On 31 July 2023, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat at the inauguration ceremony for the National Leadership Council (DPN) of the Indonesian Employers' Association (Apindo) for the 2023-2028 period at Grand Indonesia, Jakarta. On this occasion, the Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) was also present accompanied by the 10th and 12th Vice Presidents of the Republic of Indonesia Jusuf Kalla, the Coordinating Minister for the Economy (Minister of Economic Affairs) Airlangga Hartarto, and the Minister of Trade (Mendag) Zulkifli Hasan.

On this occasion, PISAgro was honored to be a member of the DPN Apindo for the 2023-2028 period in the agricultural sector, where currently, Apindo is led by Ms. Shinta Widjaja Kamdani as the Chairperson of Apindo for the 2023-2028 period.



Highlights - July 2023

PISAgro Update

Mengenal dan Memahami Metode Penghitungan Living Income untuk Kesejahteraan Petani

Ferial Lubis, Sandra Pratiwi, Nadia Fairus, Hendri Surya Widcaksana

Kemajuan sektor pertanian sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan petani sebagai aktor utamanya. Penilaian berbagai upaya peningkatan kesejahteraan petani dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dan indikator untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu fokus utama adalah menghitung Living Income atau kesejahteraan petani smallholders, yang dapat diukur dengan berbagai metode seperti NTP, Metode Anker, Metode Duncan, dan lainnya.

PISAgro menyadari pentingnya penghitungan Living Income, terutama dalam mengukur kesejahteraan petani smallholders. Oleh karena itu, diadakanlah Forum Diskusi Terbatas di antara anggota PISAgro untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pentingnya pengukuran dan penerapan Living Income. Tujuan dari forum ini adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para anggota dan mitra PISAgro mengenai makna dan tujuan serta manfaat dari penghitungan Living Income Petani, sehingga tercapai kesepahaman bersama dalam menerapkan standar Living Income untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Ringkasan Presentasi

Presentasi dimulai dengan sambutan dari Bapak Franky Welirang, Board Member PISAgro, yang menyoroti pentingnya pertanian sebagai penggerak ekonomi di Asia Tenggara dengan lebih dari 100 juta petani. Diskusi ini bertujuan untuk membahas penerapan standar pengukuran tingkat pendapatan atau kesejahteraan petani kecil di sektor pertanian di Indonesia. Diharapkan dari diskusi ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengukuran Living Income serta membentuk pendekatan yang relevan untuk diadopsi di masa depan.

Selanjutnya, pembukaan oleh Lucius Dinto Pramudyo, Working Group Leader for Living Income, menguraikan maksud diadakannya FGD

ini. Tujuan utamanya adalah untuk mendengarkan pengalaman dan pengetahuan para anggota PISAgro tentang implementasi pendekatan pengukuran pendapatan petani yang telah diterapkan di lapangan. Masukan yang didapat dari FGD akan menjadi acuan untuk menentukan fokus kerja dari Working Group Living Income ke depan. Selain itu, peserta FGD juga diundang untuk terlibat dalam Working Group Living Income, terutama bagi organisasi yang telah berkomitmen dan melaksanakan proyek terkait Living Income.

Presentasi pertama disampaikan oleh Bapak Ellan Satriawan dari Universitas Gajah Mada. Di sini, dikemukakan bahwa kemiskinan terbesar di Indonesia terdapat di sektor pertanian, dan kesejahteraan petani perlu ditingkatkan dengan pengukuran yang tepat. Data menunjukkan tren penurunan kemiskinan dalam 50 tahun terakhir, tetapi tingkat kemiskinan di perdesaan masih tinggi, dan mayoritas penduduk di perdesaan adalah petani dan pekerja di sektor pertanian.

Dalam mengukur kemiskinan, digunakan beberapa indikator seperti Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Selama ini, Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan oleh BPS untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani di Indonesia, tetapi NTP tidak dapat menjadi satu-satunya metode untuk mengukur kesejahteraan petani.

Presentasi kedua disampaikan oleh Bapak Edward Manihuruk dari GIZ Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste. GIZ menginisiasi group untuk menganalisis Living Income dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang pengukuran pendapatan hidup dan kesenjangan pendapatan. Living Income dibandingkan antara Pendapatan Aktual (Actual Income) dengan Standar (Living Income Benchmark) untuk menutup kesenjangan tersebut.

Selama presentasi, dijelaskan relevansi politik Living Income dan Living Wage bagi negara-negara eksportir yang berhubungan dengan aturan di Uni Eropa. Diperlukan suatu kesepahaman

bersama mengenai Living Income dan adanya keterlibatan organisasi dalam Working Group Living Income, terutama yang telah berkomitmen dan melaksanakan proyek terkait Living Income.

GIZ juga telah melakukan studi Living Income di Sulawesi Tengah (Kabupaten Sigi) dengan menggunakan metode Anker untuk mengetahui kebutuhan pendapatan petani kakao. Hasilnya menunjukkan gap antara kebutuhan hidup normal dan pendapatan petani, dan dari sana diciptakan program atau proyek untuk membantu menutup kesenjangan tersebut.

Harapannya, semua pihak memiliki satu suara mengenai Living Income dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan penerapan metode yang relevan dan data yang akurat.

Ringkasan dan Kesimpulan Diskusi

Diskusi mengenai Living Income menawarkan metode untuk mengukur kesenjangan antara Pendapatan Aktual (Net Farm Income + Net off-farm income + pendapatan lainnya) dengan Standar (Living Income Benchmark). Hal ini menjadi dasar bagi pemilik data atau pemilik proyek untuk merencanakan tindakan untuk menutup kesenjangan tersebut.

Dalam konteks perusahaan eksportir, terutama ke Eropa, Living Income dan Living Wage memiliki relevansi dan urgensi. Hal ini terkait dengan beberapa aturan di Uni Eropa, seperti German Due Diligence Act (LkSG), EU Legislative Process: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), dan EUDR (European Union Deforestation Regulation).

Penghitungan Living Income bisa menggunakan berbagai metode, namun yang paling penting adalah mengurangi kesenjangan antara pendapatan aktual dengan kebutuhan/pengeluaran dalam rumah tangga petani. Hal ini dapat dilakukan melalui program atau proyek yang melibatkan berbagai pihak, dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi pengeluaran petani.

Dalam menghitung kesejahteraan petani kecil, diperlukan indeks yang memperhatikan kondisi sosio-ekonomi yang spesifik berdasarkan daerah

dan komoditas yang berbeda. Penghitungan Living Income harus mempertimbangkan kebutuhan petani, jenis komoditas yang dihasilkan, dan kebutuhan hidup keluarga yang tinggal bersama petani. Namun, hingga saat ini, belum ada otoritas pemerintah yang menentukan secara holistik mengenai hal ini.

Perhitungan Living Income harus mampu mengukur dampak bagi petani, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan dukungan dari program atau subsidi, bukan hanya membandingkan sebelum dan sesudah intervensi program atau kebijakan. Pengukuran Living Income seharusnya memenuhi empat syarat, yaitu valid, berkala, dapat diandalkan, dan masuk akal.

Diskusi lanjutan dapat difokuskan pada studi Living Income yang dilakukan melalui kemitraan antar pihak, dengan mempertimbangkan komitmen dan kesamaan komoditas atau wilayah. Jika perlu, diskusi lebih rinci mengenai penerapan metode Anker dapat diadakan.

Harapannya, ada komunikasi lanjutan dan berbagi informasi mengenai kesempatan dan tantangan penerapan Living Income, baik dari lembaga seperti GIZ atau proyek strategis lainnya, yang dapat dilakukan di area atau komunitas yang sama.

PISAgro Update

Get to Know and Understand Living Income Calculation Methods for Farmers' Welfare

Ferial Lubis, Sandra Pratiwi, Nadia Fairus, Hendri Surya Widcaksana

The progress of the agricultural sector is highly dependent on the welfare level of farmers as the main actors. Assessment of various efforts to improve farmer welfare is carried out using several methods and indicators to monitor developments over time. One of the main focuses is on calculating Living Income or the welfare of smallholder farmers, which can be measured using various methods such as NTP, Anker Method, Duncan Method, and others.

PISAgro acknowledges the importance of calculating Living Income, especially in measuring the welfare of smallholder farmers. Therefore, a Limited Discussion Forum was organized among PISAgro members to share knowledge and experiences related to the importance of measuring and implementing Living Income. The goal of this forum is to raise awareness and knowledge among PISAgro members and partners regarding the meaning, purpose, and benefits of calculating Farmers' Living Income, leading to a shared understanding in applying Living Income standards to enhance farmer welfare.

Summary of the Presentation

The presentation commenced with remarks from Mr. Franky Welirang, a Board Member of PISAgro, highlighting the significance of agriculture as the economic driver in Southeast Asia with over 100 million farmers. The discussion aimed to address the implementation of standard measurements for the income and welfare of smallholder farmers in the Indonesian agricultural sector. It is expected that the discussion will increase awareness of the importance of measuring Living Income and formulate relevant approaches for future adoption.

Next, Mr. Lucius Dinto Pramudyo, the Working Group Leader for Living Income, elaborated on the purpose of organizing this FGD (Focused Group

Discussion). The main objectives were to listen to the experiences and knowledge of PISAgro members regarding the implementation of income measurement approaches for farmers in the field. The inputs received from the FGD will serve as a reference for determining the working focus of the Working Group on Living Income in the future. Additionally, FGD participants were invited to engage in the Working Group on Living Income, especially for organizations committed to and implementing projects related to Living Income.

The first presentation was delivered by Mr. Ellan Satriawan from Gadjah Mada University. It was pointed out that the greatest poverty in Indonesia exists in the agricultural sector, and the welfare of farmers needs to be improved with accurate measurement. Data shows a declining poverty trend in the last 50 years, but poverty rates in rural areas remain high, and the majority of the rural population comprises farmers and agricultural workers.

Various indicators, such as Food Poverty Line (GKM) and Non-Food Poverty Line (GKNM), are used to measure poverty. The Net Farm Income (NTP) has been used by the Indonesian Bureau of Statistics (BPS) to determine the welfare level of farmers in Indonesia, but NTP alone cannot be the sole method to measure farmer welfare.

The second presentation was delivered by Mr. Edward Manihuruk from GIZ Indonesia, ASEAN, and Timor Leste. GIZ initiated a group to analyze Living Income with the aim of enhancing understanding of income measurement and income disparities. Living Income is compared between Actual Income and the Living Income Benchmark to bridge the gap.

During the presentation, the political relevance of Living Income and Living Wage for exporting countries related to regulations in the European Union (EU) was explained. A shared understanding of Living Income and the involvement of

organizations in the Working Group on Living Income, especially those committed to and implementing projects related to Living Income, are necessary.

GIZ has also conducted a Living Income study in Central Sulawesi (Sigi Regency) using the Anker method to determine the cocoa farmers' income needs. The results showed a gap between normal living expenses and farmers' income, leading to the creation of programs or projects to help close this gap.

It is hoped that all stakeholders will have a unified voice regarding Living Income and contribute to enhancing farmer welfare through relevant methods and accurate data.

Summary and Conclusion of the Discussion

The discussion on Living Income offers methods to measure the gap between Actual Income (Net Farm Income + Net off-farm income + other income) and the Standard (Living Income Benchmark). This serves as a basis for data owners or project owners to plan actions to bridge the gap.

In the context of exporting companies, especially to Europe, Living Income and Living Wage have relevance and urgency due to regulations in the European Union, such as the German Due Diligence Act (LkSG), EU Legislative Process: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), and EUDR (European Union Deforestation Regulation).

The calculation of Living Income can use various methods, but the key is to reduce the gap between actual income and household expenses for farmers. This can be achieved through programs or projects involving multiple stakeholders, with a focus on increasing income and improving expenditure efficiency for farmers.

In calculating the welfare of smallholder farmers, an index is needed that considers specific socio-economic conditions based on regions and different commodities. Living Income calculations should take into account the needs of farmers, the type of commodities produced, and the cost of living for family members living with the farmers. However, there is currently no holistic government

authority determining this.

Living Income calculations should be able to measure the impact on farmers, including income, expenses, and support from programs or subsidies, not just comparing before and after program or policy interventions. The measurement of Living Income should meet four criteria: valid, regular, reliable, and reasonable.

Further discussions could focus on Living Income studies conducted through partnerships between various parties, considering commitment and common commodities or regions. If necessary, a more detailed discussion on the implementation of the Anker method can be held.

Hopefully, there will be ongoing communication and information sharing regarding opportunities and challenges in implementing Living Income, either through institutions such as GIZ or other strategic projects, which can be conducted in the same areas or communities.

Kabar Agro

Menyambut Bank Mandiri sebagai Anggota Baru PISAgro

Ferial Lubis, Hendri Surya Widcaksana, Sandra Pratiwi



Siring momen Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, PISAgro memperkuat komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui model kemitraan yang disebut "inclusive closed loop", sebagai sebuah pendekatan dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada semester 1 2023, kami menyambut Bank Mandiri sebagai anggota baru PISAgro, yang merupakan salah satu badan usaha milik negara dalam jasa keuangan. Sejalan dengan visi PISAgro, Bank Mandiri memiliki komitmen untuk membantu akses pendanaan kepada petani kecil di Indonesia dengan berbagai produk keuangan yang terjangkau.

Berikut kami perkenalkan lebih lanjut mengenai Bank Mandiri sebagai anggota baru PISAgro, terhitung sejak semester awal 2023.

Tentang Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

Praktik Keberlanjutan dalam Bank Mandiri

Bank Mandiri sedang mengembangkan dan mensosialisasikan praktik Keuangan Berkelanjutan, termasuk integrasi aspek Environmental, Social & Government (ESG) dalam proses bisnis internal Bank Mandiri. Implementasi praktik Keuangan Berkelanjutan ini berupaya memberikan kerangka kerja yang efektif untuk mengatasi risiko iklim dan sosial yang kita hadapi saat ini.

Dalam Mempraktikkan prinsip Keuangan Berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan secara bertahap dengan fokus pada integrasi ESG di 5 sektor prioritas, yaitu kelapa sawit dan CPO, konstruksi, energi dan air, FMCG, dan pertambangan Logam. Integrasi ini dilakukan dengan memasukkan Aspek ESG ke dalam kebijakan kredit kami yang mensyaratkan kriteria minimum seperti penyaringan positif & negatif terhadap aktivitas bisnis calon klien. 5 kebijakan sektor dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan risiko ESG spesifik di setiap sektor, dan undang-undang & peraturan nasional.

Kebijakan ini ditinjau setiap tahun dengan mempertimbangkan masukan tentang masalah lingkungan dan sosial dari pemangku kepentingan eksternal dan internal.

Dukungan Bank Mandiri untuk Sektor Pertanian

Bank Mandiri berperan aktif dalam pemberdayaan petani serta akses keuangan untuk petani melalui penyaluran KUR guna membantu permodalan petani. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan pembinaan dan pendampingan usaha untuk para petani di Indonesia. Hingga Mei 2021, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR Pertanian yang mencapai Rp4,32 triliun kepada 45.301 debitur yang terdiri

dari berbagai komoditas pertanian di Indonesia. Serapan KUR pertanian mencakup 27,53 persen total penyaluran KUR Bank Mandiri secara keseluruhan.

Sebagai contoh, Bank Mandiri memberikan dukungan dalam implementasi program Kewirausahaan Petani di Pamarican, Ciamis, Jawa Barat, yang dimulai sejak Oktober 2017. Dukungan yang diberikan meliputi penyaluran bantuan CSR Pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) kepada Gabungan Kelompok Petani Bersama (Gapoktan), penyaluran pembiayaan KUR, serta pendampingan dan pembinaan pengelolaan usaha secara professional.

Sejalan dengan PISAgro, Bank Mandiri memberikan dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi petani, dan banyak petani memperoleh manfaat dari program yang dicanangkan Bank Mandiri. Penyaluran KUR kepada petani di Pamarican hingga Mei 2021 telah mencapai Rp22,81 miliar dengan jumlah debitur mencapai 1.400 petani.

Ke depannya, kolaborasi dan sinergi kuat antara Bank Mandiri dengan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas petani serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan di Indonesia.

Agro News

Welcoming Bank Mandiri as PISAgro's New Member

Ferial Lubis, Hendri Surya
Widcaksana, Sandra Pratiwi



In line with Indonesia's chairmanship of ASEAN in 2023, PISAgro strengthens its commitment to support sustainable food security through a partnership model called "inclusive closed loop." This approach aims to achieve food security by enhancing the welfare of farmers.

In the first semester of 2023, we welcome Bank Mandiri as a new member of PISAgro, which is one of the state-owned financial institutions. Aligned with PISAgro's vision, Bank Mandiri is committed to providing affordable financial access to small farmers in Indonesia through various financial products.

Let us introduce Bank Mandiri further as a new member of PISAgro, effective from the beginning of the first semester in 2023.

About Bank Mandiri

Bank Mandiri was established on October 2, 1998, as part of the banking restructuring program initiated by the Indonesian government. In July 1999, four state-owned banks, namely Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, and Bank Pembangunan Indonesia, merged to become Bank Mandiri, each having an indispensable role in Indonesia's economic development. Until today, Bank Mandiri continues a tradition of over 140 years of contributing to the banking and economic sectors in Indonesia.

Sustainability Practices in Bank Mandiri

Bank Mandiri is currently developing and socializing Sustainable Finance practices, including the integration of Environmental, Social & Government (ESG) aspects in Bank Mandiri's

internal business processes. The implementation of this Sustainable Finance practice seeks to provide an effective framework for addressing the climate and social risks we face today.

In practicing the principles of Sustainable Finance, Bank Mandiri is doing it in stages with a focus on integrating ESG in 5 priority sectors, namely palm oil and CPO, construction, energy and water, FMCG, and metal mining. This integration is carried out by incorporating ESG Aspects into our credit policy which requires minimum criteria such as positive & negative screening of prospective clients' business activities. The 5 sector policies are developed in stages taking into account the specific ESG risks in each sector, and national laws & regulations.

This policy is reviewed annually taking into account input on environmental and social issues from external and internal stakeholders.

Bank Mandiri Support for the Agricultural Sector

Bank Mandiri plays an active role in empowering farmers and accessing finance for farmers through the distribution of KUR to help farmers with capital. In addition, Bank Mandiri also conducts business coaching and assistance for farmers in Indonesia. As of May 2021, Bank Mandiri has disbursed Agricultural KUR which reached IDR 4.32 trillion to 45,301 debtors consisting of various agricultural commodities in Indonesia. Agricultural KUR uptake covers 27.53 percent of Bank Mandiri's total KUR distribution as a whole.

For example, Bank Mandiri provides support in the implementation of the Farmer Entrepreneurship program in Pamarican, Ciamis, West Java, which began in October 2017. The

support provided includes distributing CSR assistance for the Development of Integrated Rice Processing Centers (SPBT) to Joint Farmers Group Association (Gapoktan), distribution of KUR financing, as well as mentoring and coaching in professional business management.

In line with PISAgro, Bank Mandiri provides affordable financial support for farmers, and many farmers benefit from the program launched by Bank Mandiri. KUR distribution to farmers in Pamarican until May 2021 has reached IDR 22.81 billion with the number of debtors reaching 1,400 farmers.

Going forward, strong collaboration and synergy between Bank Mandiri and other stakeholders is expected to help increase farmer productivity and farmer welfare in a sustainable manner in Indonesia.

Kabar Agro

Menyambut ID FOOD sebagai Anggota Baru PISAgro

Ferial Lubis, Hendri Surya Widcaksana, Sandra Pratiwi



Seiring momen Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, PISAgro memperkuat komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui model kemitraan yang disebut "inclusive closed loop", sebagai sebuah pendekatan dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada semester 1 2023, kami menyambut ID Food sebagai anggota baru PISAgro, yang merupakan holding BUMN di bidang pangan, yang terdiri dari berbagai anak perusahaan, beberapa diantaranya adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PT Sang Hyang Seri.

Berikut kami perkenalkan lebih lanjut mengenai ID FOOD sebagai anggota baru PISAgro, terhitung sejak semester awal 2023.

Tentang ID FOOD

ID FOOD merupakan corporate brand name dari Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Holding BUMN Pangan dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 2021, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham PT RNI (Persero), yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 555/KMK.06/2021, tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham PT RNI (Persero).

Pembentukan Holding Pangan secara resmi ditandai dengan penandatanganan Akta Inbreng Saham Pemerintah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan kelima BUMN Pangan pada

7 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan launching corporate brand name ID FOOD oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir pada 12 Januari 2022. Perubahan corporate brand name menjadi ID FOOD dimaksudkan untuk memberikan arah dan fokus yang lebih jelas kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Induk Holding Pangan.

Aktivitas bisnis ID FOOD bergerak dalam bidang Pertanian dan Agroindustri, Peternakan dan Perikanan, serta Perdagangan dan Logistik. ID FOOD beranggotakan 5 perusahaan eks BUMN, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam, serta 11 Anak Perusahaan existing yang terdiri dari, PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Laras Astra Kartika, PT Mitra Kerinci, PT Rajawali Nusindo, PT GIEB Indonesia, PT Mitra Rajawali Banjaran, PT Rajawali Citramass, dan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

ID Food sendiri bergerak di beberapa komoditas, yakni kelapa sawit, beras, garam, teh, tebu, serta sektor pendukung yakni agribisnis dan fasilitas pertanian. PISAgro dan ID Food memiliki komitmen yang sama untuk pemberdayaan petani serta mendukung ketahanan pangan serta inklusivitas dalam mewujudkan pertanian yang lebih berkelanjutan. Hadirnya Holding Pangan bertujuan untuk mewujudkan tiga objektif Utama, yaitu mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan inklusivitas petani, peternak dan nelayan, serta menjadi perusahaan pangan berkelas dunia.

Sejalan dengan PISAgro, ID FOOD memberikan dukungan pembinaan dan pendampingan yang

terjangkau bagi petani, dan banyak petani memperoleh manfaat dari program yang dicanangkan ID FOOD.

Ke depannya, kolaborasi dan sinergi kuat antara ID FOOD dengan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas petani serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan di Indonesia.

Agro News

Welcoming ID FOOD as PISAgro's New Member

Ferial Lubis, Hendri Surya
Widcaksana, Sandra Pratiwi

In line with Indonesia's chairmanship of ASEAN in 2023, PISAgro strengthens its commitment to support sustainable food security through a partnership model called "inclusive closed loop." This approach aims to achieve food security by enhancing the welfare of farmers.

In semester 1 2023, we welcome ID Food as a new member of PISAgro, which is a state-owned holding company in the food sector, which consists of various subsidiaries, some of which are PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Indonesian Trading Company, and PT Sang Hyang Seri .

In the following, we will introduce more about ID FOOD as a new member of PISAgro, starting from the first semester of 2023.

About ID FOOD

ID FOOD is the corporate brand name of the Main Holding of Food State-owned Enterprises PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). State-owned Enterprises Food Holding was formed and stipulated by the Government based on Government Regulation (PP) Number 118 of 2021, regarding the Addition of RI State Equity Participation into the share capital of PT RNI (Persero), which is supplemented by Minister of Finance Decree (KMK) Number 555/KMK.06 /2021, concerning the Determination of the Value of RI State Equity Participation in PT RNI (Persero) Share Capital.

The establishment of the Food Holding was officially marked by the signing of the Government Stock Inbreng Deed between PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and the five Food BUMNs on January 7 2022, followed by the launching of the corporate brand name



ID FOOD by RI Minister of BUMN Erick Thohir on January 12 2022. Changes The corporate brand name to ID FOOD is intended to provide clearer direction and focus to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the Food Holding Company.

ID FOOD's business activities are engaged in Agriculture and Agro-industry, Livestock and Fisheries, and Trade and Logistics. ID FOOD consists of 5 former BUMN companies, namely PT Indonesian Trading Company, PT Sang Hyang Seri, PT Fisheries Indonesia, PT Berdikari, and PT Garam, as well as 11 existing Subsidiaries consisting of, PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Laras Astra Kartika, PT Mitra Kerinci, PT Rajawali Nusindo, PT GIEB Indonesia, PT Mitra Rajawali Banjaran, PT Rajawali Citramass, and PT Rajawali Tanjungsari Engineering.

ID Food itself is engaged in several commodities, namely palm oil, rice, salt, tea, sugar cane, as well as supporting sectors, namely agribusiness and agricultural facilities. PISAgro and ID Food share the same commitment to empowering farmers and supporting food security and inclusiveness in creating a more sustainable agriculture.

The presence of the Food Holding aims to realize three main objectives, namely supporting national food security, increasing the inclusiveness of farmers, breeders and fishermen, and becoming a world-class food company.

In line with PISAgro, ID FOOD provides affordable coaching and mentoring support for farmers, and many farmers benefit from the program launched by ID FOOD.

Going forward, strong collaboration and synergy between ID FOOD and other stakeholders is expected to help increase farmer productivity and farmer welfare in a sustainable manner in Indonesia.

Kabar Agro

Menyambut Kembali Unilever Indonesia sebagai Anggota Baru PISAgro

Ferial Lubis, Hendri Surya
Widcaksana, Sandra Pratiwi

Seiring momen Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, PISAgro memperkuat komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui model kemitraan yang disebut "inclusive closed loop", sebagai sebuah pendekatan dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada semester 1 2023, kami menyambut kembali kehadiran Unilever Indonesia sebagai bentuk penguatan komitmen Unilever Indonesia untuk memberdayakan pendapatan hidup para petani lokal Indonesia, guna menunjang produktivitas pertanian, terutama di sektor Hortikultura sebagai salah satu pilar produksi dari Unilever Indonesia.

Berikut kami perkenalkan lebih lanjut mengenai Unilever Indonesia sebagai anggota baru PISAgro, terhitung sejak semester awal 2023.

Tentang Unilever Indonesia

Dalam membangun sebuah perusahaan dibutuhkan interaksi kepada masyarakat sekitar dengan tujuan untuk mempermudah perusahaan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. PT Unilever Indonesia Tbk. membentuk Unilever Indonesia Foundation atau Yayasan Unilever Indonesia (UIF) sebagai bentuk upaya perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

UIF memiliki tiga pilar dalam melaksanakan program programnya yaitu, (1) peningkatan taraf hidup; (2) lingkungan; (3) kesejahteraan dan nutrisi. Misi yang dimiliki oleh Yayasan Unilever Indonesia (UIF) yaitu mencari dan memberdayakan berbagai potensi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, menyatukan kekuatan dengan



mitra-mitranya, dan bertindak sebagai katalis untuk pembentukan kemitraan. Salah satu dari beberapa Program-program yang dipublikasikan oleh Unilever Indonesia Foundation yaitu Pilar Peningkatan Taraf Hidup, yang dimana Unilever Indonesia menjadi bagian dari Kelompok Kerja Living Income.

Komitmen Utama Unilever

Unilever Indonesia memiliki komitmen untuk berperan dalam pencapaian target global dalam meningkatkan taraf hidup lebih dari 500.000 petani kecil dan distributor skala kecil dengan melibatkan mereka dalam rantai pasokan perusahaan. Di Indonesia, para petani kecil memiliki peranan yang penting dalam rantai suplai produk pertanian. Pemerintah, akademisi dan juga LSM lokal merupakan mitra utama UIF yang memainkan peranan penting dalam membuat kemitraan berjalan dengan efektif dan efisien demi kesejahteraan bangsa.

Faktor keberhasilan dari pilar ini adalah adanya bantuan yang cukup dari berbagai pihak, akses permodalan, pengembangan benih, pengembangan koperasi dan jaminan pasar. Petani kedelai hitam merupakan salah satu sasaran UIF dalam menjalankan pilar peningkatan taraf hidup. Hal ini dikarenakan PT Unilever Indonesia yang memproduksi kecap manis membutuhkan kedelai hitam sebagai bahan utamanya. Program ini mengembangkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas budidaya kedelai hitam demi meningkatkan penghidupan petani.

Pemberdayaan Petani

Program pengembangan petani kecil di bawah pilar peningkatan taraf sudah mencakup keuntungan bagi perusahaan berupa pengelolaan bahan baku

menjadi bahan siap pakai atau konsumsi yang dipasarkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Melalui pilar ini, kemampuan para petani kecil menjadi lebih luas dan kemampuan mereka dapat terasah sehingga dapat mengeksplorasi bahan mentah hingga dapat mengelolanya secara mandiri.

Pada kesempatan ini, kami mendapat kehormatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan dari Unilever Indonesia mengenai peran, ekspektasi, dan kolaborasi dengan PISAgro.

1. Jelaskan tentang organisasi Anda.

Unilever adalah salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di dunia. Kami dibangun dengan tujuan yang menjadi inti dari semua yang kami lakukan – baik sebagai karyawan, merek, atau perusahaan. Di Indonesia, Unilever didirikan pada tahun 1933. Sejak saat itu, Unilever telah menemani masyarakat Indonesia dalam kesehariannya melalui produk-produk seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wall's, Royco , Bango dan lainnya.

Pendekatan bisnis berkelanjutan kami mengacu pada kompas baru kami yang diumumkan pada tahun 2021, yaitu Kompas Unilever. Serangkaian komitmen ini membantu kami tidak hanya memberikan kinerja yang unggul, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Salah satu pilarnya adalah masyarakat yang adil dan inklusif dengan meningkatkan standar hidup di seluruh rantai nilai kami. Pada tahun 2030, setiap orang yang secara langsung menyediakan barang dan jasa kepada Unilever akan memperoleh Upah Layak atau Penghasilan Layak. Kami secara khusus akan berfokus pada pekerja yang paling rentan di bidang manufaktur dan pertanian yang bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi sistemik guna meningkatkan standar hidup melalui praktik pembelian, kolaborasi, dan advokasi di mana pun kami beroperasi.

2. Bisa Anda jelaskan peran khusus dan fokus masalah Anda dalam organisasi Anda?

Kami secara global bertujuan untuk mengubah rantai pasokan Perusahaan menuju praktik yang lebih berkelanjutan dalam mencari bahan baku dan memproduksi barang serta menghilangkan deforestasi. Kami tegas dalam komitmen kami untuk meningkatkan transparansi, memanfaatkan teknologi, dan menerapkan Prinsip Pertanian

Regeneratif Perusahaan yang baru untuk meningkatkan pendapatan petani, mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan dan adil, dan mengatasi keadaan darurat ekologi dan iklim.

3. Peran apa yang ingin Anda mainkan di PISAgro?

Dalam konteks pertanian berkelanjutan, niat kami adalah untuk memainkan peran katalitik dalam mempromosikan Pendapatan Hidup Layak. Didorong oleh komitmen kami dan memanfaatkan keahlian, skala, dan jejak proyek kami, kami bertujuan untuk membentuk kelompok kerja sebagai pusat pengetahuan yang memberikan wawasan dan sumber daya yang berharga untuk kemitraan yang berkaitan dengan agenda Living Income. Dengan memfasilitasi kolaborasi di antara anggota dan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk pemerintah, bisnis, CSO, dan petani kecil, kami berupaya mengambil bagian dalam mendorong tindakan kolektif dan mendorong perubahan yang berarti di sektor pertanian.

4. Apa yang Anda harapkan dari PISAgro?

Kami berharap PISAgro menjadi platform kolaboratif yang memupuk dialog terbuka dan berbagi pengetahuan. Kami optimis bahwa kemitraan ini akan memungkinkan kami untuk memperkuat dampak inisiatif kami dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, kami berharap dapat berkolaborasi dalam proyek bersama dan memanfaatkan sumber daya kolektif untuk mempromosikan pendapatan hidup yang berkelanjutan di seluruh sektor pertanian.

5. Isu apa yang menurut Anda harus dikontribusikan lebih banyak oleh PISAgro di masa mendatang?

Ke depan, kami yakin bahwa PISAgro juga dapat berkontribusi lebih besar pada dimensi sosial pertanian berkelanjutan dengan mengakui kesetaraan dan inklusi sosial. Kemitraan harus secara aktif mempromosikan mata pencaharian, kondisi kerja yang adil, kesetaraan gender, dan inklusi kelompok marginal yang mencakup petani kecil dan buruh tani.

Sejalan dengan PISAgro, Unilever Indonesia memberikan dukungan yang inklusif bagi petani, dan banyak petani memperoleh manfaat dari program yang dicanangkan oleh Unilever Indonesia.

Ke depannya, kolaborasi dan sinergi kuat antara Unilever Indonesia dengan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas petani serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan di Indonesia.

Agro News

Welcoming Back Unilever Indonesia as PISAgro's New Member

Ferial Lubis, Hendri Surya
Widcaksana, Sandra Pratiwi

In line with Indonesia's chairmanship of ASEAN in 2023, PISAgro strengthens its commitment to support sustainable food security through a partnership model called "inclusive closed loop." This approach aims to achieve food security by enhancing the welfare of farmers.

In semester 1 2023, we welcomed back Unilever Indonesia's presence as a form of strengthening Unilever Indonesia's commitment to empower local Indonesian farmers' living income, to support agricultural productivity, especially in the Horticulture sector as one of Unilever Indonesia's production pillars.

In the following, we introduce further about Unilever Indonesia as a new member of PISAgro, starting from the first semester of 2023.

About Unilever Indonesia

In building a company, interaction with the surrounding community is needed with the aim of making it easier for the company to adapt to the surrounding environment. PT Unilever Indonesia Tbk. established the Unilever Indonesia Foundation or the Unilever Indonesia Foundation (UIF) as a form of the company's efforts to carry out its social responsibility towards the surrounding community.

UIF has three pillars in implementing its programs, namely, (1) improving living standards; (2) environment; (3) well-being and nutrition. The mission of the Unilever Indonesia Foundation (UIF) is to find and empower various community potentials, provide added value to the community, unite strength with its partners, and act as a catalyst for forming partnerships. One of several programs published by the Unilever Indonesia



Foundation, namely the Pillar of Increasing Living Standards, where Unilever Indonesia is part of the Living Income Working Group.

Unilever's Key Commitments

Unilever Indonesia is committed to playing a role in achieving the global target of improving the lives of more than 500,000 smallholder farmers and small-scale distributors by involving them in the company's supply chain. In Indonesia, smallholder farmers have an important role in the supply chain of agricultural products. The government, academics and local NGOs are UIF's main partners who play an important role in making the partnership run effectively and efficiently for the welfare of the nation.

The success factors of this pillar are sufficient assistance from various parties, access to capital, seed development, cooperative development and market guarantees. Black soybean farmers are one of UIF's goals in carrying out the pillars of improving living standards. This is because PT Unilever Indonesia, which produces sweet soy sauce, requires black soybeans as its main ingredient. This programme develops various activities to increase the productivity of black soybean cultivation to improve farmer livelihoods.

Smallholders Empowerment

The smallholder development program under the pillar of level improvement includes benefits for the company in the form of managing raw materials into ready-to-use or consumption materials that are marketed by the company to the public. Through this pillar, the capabilities of small farmers become wider and their skills can be honed so that they can explore raw materials to be able to manage them independently.

On this opportunity, we're honoured to had an interview with one of the representatives from Unilever Indonesia regarding roles, expectations, and future collaborations with PISAgro.

1. Describe about your organisation.

Unilever is one of the world's largest consumer goods companies. We are built on purpose which sits at the heart of everything we do – whether as an employee, a brand or a company. In Indonesia, Unilever was established in 1933. Since then, Unilever has been accompanying Indonesians in their daily lives through products such as Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rins, Molto, Sunlight, Wall's, Royco, Bango and more.

Our sustainable business approach refers to our new compass that announced in 2021, namely The Unilever Compass. This set of commitments helps us not only to deliver superior performance, but also drive sustainable and responsible growth. One of the pillars is equitable and inclusive society by raising living standards across our value chain. By 2030, everyone who directly provides goods and services to Unilever will earn a Living Wage or a Living Income. We will specifically focus on the most vulnerable workers in manufacturing and agriculture working with stakeholders toward creating systemic solutions to raising living standards through purchasing practices, collaboration, and advocacy wherever we operate.

2. Can you describe what are your distinctive roles and issue focus in your organisation?

We globally aim to transform the Company's supply chain towards more sustainable practices in sourcing raw materials and producing goods and eliminate deforestation. We are resolute in our commitment to enhance transparency, harness technology, and implement new Corporate Regenerative Agriculture Principles to increase farmers' income, promote sustainable and equitable livelihoods, and address ecological and climate emergencies.

3. What role you would like to play as what in PISAgro?

In the context of sustainable agriculture, it is our intention to play a catalytic role in promoting Living Income. Driven by our commitments and leveraging our expertise, scale, and project footprint, we aim to establish a working group as a knowledge hub that provides valuable insights

and resources to the partnership pertaining the Living Income agenda. By facilitating collaboration among diverse members and stakeholders, including governments, businesses, CSOs, and smallholders, we seek to take part in fostering collective action and drive meaningful change in the agricultural sector.

4. What you expect from PISAgro?

We expect PISAgro to be a collaborative platform that fosters open dialogue and knowledge sharing. We are optimistic that the partnership will enable us to amplify the impact of our initiatives and reach a broader audience. Additionally, we hope to collaborate on joint projects and leverage collective resources to promote a sustainable living income across the agricultural sector.

5. What issues you think PISAgro should contribute more in the future?

Looking ahead, we believe that PISAgro could also contribute more to social dimension of sustainable agriculture by recognizing the social equity and inclusion. The partnership should actively promote livelihoods, fair working conditions, gender equity, and inclusion of marginalized communities that includes smallholder farmers and agricultural laborers.

In line with PISAgro, Unilever Indonesia provides inclusive support for farmers, and many farmers benefit from the program launched by Unilever Indonesia.

Going forward, strong collaboration and synergy between Unilever Indonesia and other stakeholders is expected to help increase farmer productivity and farmer welfare in a sustainable manner in Indonesia.



Sinarmas Land Plaza, Tower 2,
22nd Floor. Jl. MH Thamrin 51,
Jakarta 10350, Indonesia

✉ contact@pisagro.org
🌐 www.pisagro.org

📷 pisagro_secretariat
🐦 📱 🌐 PISAgro

Anggota-anggota PISAgro - PISAgro Members



Mitra-mitra PISAgro - PISAgro Partners

